

AKUNTABILITAS PERENCANAAN
ANGGARAN DANA DESA UNTUK
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
BELEKE KECAMATAN GERUNG LOMBOK
BARAT 2020

By BUYUNG PRIMANANDA

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PERENCANAAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BELEKE KECAMATAN
GERUNG LOMBOK BARAT 2020**



Disusun Oleh :

BUYUNG PRIMANANDA
NIM.217130052

8
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021

7 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dan proses politik yang berjalan simultan, yaitu desentralisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal mampu nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik (Dwipayana, 2003:5).

Menurut Dwipayana (2003:6) desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antar daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan diantara lembaga lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran *locus politics* dari pemerintah oleh birokrasi menjadi pemerintah oleh partai (*party government*).

Sementara itu Noordiawan (2007:284) menyuarakan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepala daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.

Pembangunan Desa dilakukan dalam rangka pembangunan yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan termasuk di Desa, terdiri dari berbagai sektor dan program yang saling berkaitan serta dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui berbagai departemen dengan aparatnya di daerah dinas-dinas pemerintah daerah sesuai dengan pokok dan tanggung jawab masing masing. Selanjutnya pembangunan desa dikerahkan untuk meletakkan dasar pembangunan nasional yang sehat dan kuat, dimana Kesa/Kelurahan merupakan landasan Ekonomi Sosial, Budaya, Politik, keamanan dan landasan Nasional.

Perencanaan adalah suatu penentuan urutan tindakan pikiran biaya serta penggunaan waktu dan tenaga untuk satu kegiatan yang didasarkan atas data data dengan memperhatikan skala prioritas yang wajar dan efisien untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sehingga komponen komponen harus dipadukan secara tepat dan serasi agar terhindar dari timbulnya pemborosan yang meliputi tenaga, bahan, waktu dan biaya.

Akuntabilitas perencanaan anggaran desa menjadi tolak ukur sukses apa tidaknya suatu desa kerna disanalah semua perencanaan anggarannya terlebih lagi Desa Beleke Kecamatan Gerung tempat saya tinggal fakta yang terjadi juga

adanya patologi ditengah tengah masyarakat yang masih belum semua bertanggung jawabkan apa yang telah di sepakati bersama diakibatkan masyarakat berkubu kubu dan kurangnya partisipasi masyarakat ke Desa. Pemuda yang ada di Desa Beleke juga stagnan cenderung menurun kepeduliannya terhadap desa nya sendiri sehingga saat perencanaan anggaran dibahas agak sedikit yang hadir dan perwakilan dari pemuda itu kurang disana hanya melibatkan aparatur Desa itu sendiri. Kurang nya pihak Desa juga jarang mensosialisasikan program program unggulannya misalnya rabat jalan dan infrastruktur lainnya memakan banyak biaya namun kurang pertanggungjawabannya sehingga ketika sudah dlaksanakan rabat jalan dibiarkan tidak dipantau lagi kenapa sampai cepat berlubang jalan yang kemarin dirabat akhirnya dirabat ulang yang rusak dan bagai mana dan mengakibatkan rebat ulang lagi di tempat yang sama memakan biaya lagi.

Bahkan cenderung anggaran dana desa di Desa beleke ini defisit pada tahun yang lalu ini Infrastruktur yang dibangun juga tidak terlalu mewah lampu penerangan jalan tidak semua merata itulah kenapa saya sangat tertarik untuk membahas akuntabilitas perencanaan anggaran dana desa di Desa Beleke ini karna disanalah harus adanya akuntabilitas dan perencanaan anggaran dana desa nya harus benar matang tentu memperhatikan prosedur-prosedur yang ada

dan mendengarkan keluhan keluhan masing masing dusun yang ada di Desa itu sendiri

Dalam melaksanakan perencanaan anggaran Desa, sering dijumpai timbulnya masalah kurangnya partisipasi masyarakat dan peran pemuda di Desa Beleke itu sangat kurang juga aparatur yang ada di setiap dusun itu hanya memikirkan ego masing-masing yang tentu menyebabkan pemerataan kurang berjalan pada saat anggaran sudah disepakati bersama. Masalah Justru adanya permasalahan menyebabkan timbulnya kegagalan kegagalan dari suatu pelaksanaan kegiatan masyarakat.

4
Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik praktik pemerintahan yang baik asas asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kewajiban yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Kejadian ini perlu diatasi untuk menghindari akibat negatif yang tidak mendukung berkembangnya partisipasi positif masyarakat di Desa Beleke Kecamatan Gerung itu sendiri oleh karena itu peran pemerintah Desa sangat dibutuhkan sekali ditengah masyarakat yang masih awam dan cenderung ingin mendapatkan hasil dengan cara instan tanpa melalui proses sebagai mestinya dan peraturan yang sudah di tentukan.

⁶⁵ Undang undang nomor 6 tahun 2014 dalam undang undang ini dikmaksud dengan Desa adalah ³⁵ Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakersa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sisitem pemerintah Negara republik Indonesia

¹⁰ Seluruh Desa di Indonesia diperkirakan sudah akan menerima kucuran dana transfer dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), Juli 2014 mendatang. Setiap Desa saat ini jumlahnya mencapai 72 ribu di seluruh indonesia, akan memproleh anggaran bekisaran Rp 800 juta hingga Rp 1,4

miliar perdesa. Pengucuran anggaran akan berbeda untuk setiap Desa karna disesuaikan dengan luas Desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di Desa tersebut.

Setiap Desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber dana. Dana transfer (dari APBN) jumlahnya Rp 59,2 triliun kemudian alokasi dana Desa di kabupaten. jadi setiap desa mendapatkan lebih dari 1 miliar setiap tahun. Transfer dana tersebut hanya untuk desa. Sementara terkait kelurahan termasuk dalam penerima asalnya, kerna kelurahan masuk struktur pemerintah.

⁷⁶ Pola pembangunan yang sekarang ini dikembangkan di Desa yakni pembangunan partidipatif ²⁰ merupakan pola pembangunan yang lama di lakukan bangsa ini jauh sebelum kemerdekaan dan mayoritas masyarakat Desa sudah menjadikan hal tersebut budaya seperti gotongroyong, kerja bakti serta tanggung jawab namun pola yang dikembangkan ini merupakan penyempurnaan dari bentuk sebelumnya dengan lebih terpadu, terencana dan sistematis.

Berbagai program seperti yang sifatnya penanggulangan kemiskinan bantuan kesehatan, pendidikan, pembangunan fisik dan segala yang pernah ada, sering berupa untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktor utama namun realitasnya ⁶² sebagian besar pelaksanaannya terjebak dengan pendekatan

formalitas partisipasi, dimana rancangan dan proses pembelajaran dan keaktifan bagi masyarakat serta hasil yang di peroleh berupa terangkatnya permasalahan dan potensi masyarakat secara murni seringkali tidak muncul dalam konteks tersebut

4 I.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah akuntabilitas perencanaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok Barat 2020?

41 I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan anggaran dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok barat tahun 2020

22 I.4 Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga manfaat yaitu, teoritis, praktis dan akademik sebagai berikut

A. Manfaat Toritis

Manfaat bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat judul yang sama Hasil penelitian ini sebagai sarana pembimbing yang diharapkan dapat membrikan kontribusi yang cukup bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan didalam

politik. Dan juga utama dari penelitian ini diharapkan mampu membrikan gambaran tentang akuntabilitas perencanaan anggaran dana Desa.

B. Manfaat praktis

Peneliti ini bisa dijadikan ⁷⁰ salah satu bahan acuan bagi pihak desa yang berkaitan dengan akuntabilitas perencanaan anggaran dana desa. Dan juga bisa dijadikan sebagai salah satu refrensi berkaitan dengan akuntabilitas perencanaan.

C. Manfaat akademilk

Secara akademik ⁶⁶ sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan dan ⁸ mendapatkan gelar strata satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Mataram

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat menjadi salah satu acuan atau referensi penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperluas teori-teori yang digunakan untuk memperdalam bahan kajian dan pembahasan pada penelitian ini. Adapun dari beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Hasil penelitian terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Relevansi
1	Sitiainul 16 Itha, Djoo Supatmoko, Taufik Kurrohman. 2017	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Di Desa- Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Kualitatif	tabilitas dan 47 m perencanaan telah berlangsung dengan memuaskan ,sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 12	Penelitian ini memiliki relevansi dengan judul penelitian yang berupa judul berupa metode yang kita gunakan juga teori tentang akuntabilitas.
2	Deti kuma lasari , ikhsa n budi	Transparansi dan akun tabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan n alokasi	Kualitatif deskriptif	Pemerintah desa bomo kecamatan regojampi kabupaten banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip	Relevansi dengan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis ialah tentang

	<i>riharjo .2016</i>	<i>dana desa.</i>		<i>trasparansi dan akuntabilitas.</i>	<i>akuntabilitas dan juga metode penelitian yang dia gunakan</i>
3	<i>Puteri ainur rohma romantis .2014</i>	<i>Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan penarukan kabupaten situbondo tahun 2014</i>	<i>Analisis deskriptif kualitatif</i>	<i>Sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sedangkan alokasi dana desa ADD baik secara administrasi sudah baik namun harus mendapat atau di berikan bimbingan dari pemerintah kecamatan</i>	<i>Relevansi dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada judul dan juga metode yang digunakan dalam penelitian.</i>
4	<i>Agus subroto. Tahun 2008</i>	<i>Akuntabilitas pengelolaan dana desa di studi kasus pengelolaan dana desa di desa desadalam wilayah kecamatan tlogmulyo kabupaten tamagung tahun 2008</i>	<i>Kualitatif</i>	<i>Perencanaan dan pelaksanaannya kegiatan alokasi dana desa, sudah menempatkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat dari hasil fisik sudah menampakkan ada nya pengelolaan yang akuntabel dan transparan,</i>	<i>Relevansinya metode penelitian ini dengan yang di angkat oleh penulis judul , metode penelitian da juga beberapa teori.</i>

				<p>14 namun di sisi administrasi masih perlu pembinaan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.</p>	
5	Lina nasehatun nafid ah, Nur anisa .2017	akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten jombang	Deskriptif kualitatif	<p>12 dan peraturan bupati nomor 33 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa secara garis besar pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas selain itu masih di perlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang instensif dalam membantu desa untuk menghujutkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p>	Relevansi penelitian ini memiliki judul atau penelitian yang di lakukan penulis dan juga dalam metode penelitian yang digunakan.

Setelah penulis mendapatkan referensi dari para penelitian terdahulu yang dilihat mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang diangkat dan sesuai didalam penulisan proposal diantaranya yang pernah dilakukan yaitu:

Pertama, ¹⁶ Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman. 2017 dengan judul akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa(ADD) di Desa-Desa kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, ¹⁶ metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam perencanaan ⁴⁷ telah berlangsung dengan memuaskan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. penelitian memiliki relevansi dengan judul penelitian yang berupa judul beberapa metode yang kita gunakan teori tentang akuntabilitas.

Kedua, ⁴⁴ Deti Kumalasari, Iksan Budi Riharjo. 2016 dengan judul transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. jenis penelitian yang dipakai Kualitatif Deskriptif dan hasil penelitian ⁵⁷ pemerintah Desa Bomo kecamatan Regojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Relevansi dengan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis ialah tentang akuntabilitas dan juga metode nya ialah tentang akuntabilitas dan juga metode penelitian yang di gunakan

Ketiga, ¹⁴ Puteri ainurrohma romantis. 2014 dengan judul akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa kecamatan penarukan kabupaten sitobondo metode yang digunakan analisa Deskriptif Kualitatif dan hasil nya system

⁶ akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan menerapkan prinsip transparansi pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas sedangkan alokasi dana Desa ADD baik secara maupun administrasi bimbingan pemerintah

²² Relevansi dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada judul dan juga metode yang di gunakan dalam penelitian.

Ke Empat, ⁴⁶ Agus Subroto, Tahun 2008 dengan judul akuntabilitas pengelolaan dana dana Desa di studi kasus pengelolaan dana Desa di Desa dalam wilayah kecamatan tlogmulyo kabupaten tamanggung tahun 2008 metode penelitian yang di pakai kualitatif hasil nya ²² perencanaan dan pelaksanaan nya kegiatan kegiatan alokasi dana Desa, sudah menempatkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparansi sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat dari hasil fisik sudah menampakan adanya pengelolaan yang akuntabilitas tranparan namun disisi dengan ketentuan yang ada.

Ke Lima Lina nasehatun nafidah, Nuranisa, ⁴³ 2017 dengan judul pengelolaan kuangan desa di kabupaten jombang jenis penelitian yang digunakan Kualitatif hasil nya ¹⁷ peraturan bupati nomor 33 tahun 2015 pengelolaan keuangan desa secara garis secara garis besar pengelolaan kuangan desa telah mencapai akuntabilitas ⁴³ pendampingan desa dari pemerintah daerah yang instensif dalam membantu desa untuk menghujutkan akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa dan Relevansinya penelitian ini memiliki judul atau penelitian yang di lakukan penulis dan juga dalam penelitian yang di gunakan.

2.2 Akuntabilitas Kebijakan Publik

Menurut Bastian (2010:385) akuntabilitas publik adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara preodik.

Menurut Bowen,2020 akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi yang sangat penting yaitu:

1. Alat control kerja demokrasi sebagai mana kita tahu Negara Indonesia menganut sisitem demokrasi. Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
2. menekan alat penyalahgunaan wewenang / tindakan korupsi menurut Robert klitgaard kekuasaan / kewenangan cenderung mengarah pada korupsi hal inilah yang tidak hanya disebabkan oleh keinginan pribadi untuk mendapatkan banyak harta dengan cara instan tapi juga di dukung oleh adanya cacat sisitem yang bias di maaatkan.
3. meningkatkan efesiensi efektifitas suatu proses yang efesien memberikan keuntungan yang banyak bagi perusahaan, organisasi atau instansi pemerintahan. Sebuah system yang efesien tidak bias begitu saja di ciptakan , namun pasti begitu saja diciptakan, namun pasti melalui proses bertahap dan evaluasi terus menerus dinilah pentingnya akuntabilitas. Ada nya akuntabilitas juga di gunakan pemenang kepentingan untuk mengetahui titik titik mana saja yang belum efesien , apa masalah nya dan bagaimana fokus pemecahan masalah yang perlu di cari.

Sjahuruddin Rasul (2000) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban

kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau kelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi dalam konteks institusi pemerintah.

¹⁸ J.B gharthey (1998) menanyakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pernyataan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan

Ledvina V, Carino (2002) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangan. Setiap orang harus benar benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan tetapi ia harus menyadari bahwa tindakannya akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain.

² Menurut Mursyudi (2013), akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara teoritik.

⁴ Meneurut Halim (2012), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hokum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Prinsip dan Dimensi Akuntabilitas menurut LAN dan BPKP (2000)

prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat meminjam penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus menunjukkan tingkat pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
4. Harus berorientasi pada perencanaan visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

Menurut muhamadi (2013), terdapat lima dimensi akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probity dan legality) akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum bekerja dan mentaati ketentuan hukum

yang berlaku penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otoritas.

2. Akuntabilitas manajerial (managerial accountability) akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien akuntabilitas kinerja (performance accountability). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klayen atau costumernya.

15
3. Akuntabilitas program (program accountability). Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga lembaga yang harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program. Dengan kata lain akuntabilitas berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bertemu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability). Akuntabilitas kebijakan terakit dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat

mempertanggungjawabkan kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sasarannya pemangku kepentingan dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

4. Akuntabilitas finansial (financial accountability)

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik untuk menggunakan uang publik (money public) secara ekonomi, efisien dan efektif tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik

Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2013) Akuntabilitas terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability). Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepada kepala dinas kepada bupati atau walikota menteri presiden, kepala unit kepala kepala cabang CEO, dan sebagainya.
2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lain yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Menurut Wasistiono (2007) berdasarkan persfektifnya akuntabilitas di bagi menjadi lima jenis, yaitu :

1. Akuntabilitas administratif/organisasi. Pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahnya dalam hubungan hierarki yang jelas.
2. Akuntabilitas legal.akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain publik dikatakan dengan proses legislative dan yudikatif bentuknya dapat berupa peminjaman kembali kebijakan yang telah di ambil oleh pejabat public maupun pembatalan sesuatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akuntabilitas politik. Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas perdistribusian sumber sumber dan menjamin adanya kepatuhan m
4. Pelaksanakan tanggung jawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinanyakan oleh administrasi publik.
5. Akuntabilitas professional. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang

profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.

6. Akuntabilitas moral. Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku dikalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang /badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

Menurut Raba (2006), akuntabilitas dibagi menjadi empat jenis,yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik untuk menjamin dijalankan jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan
2. Akuntabilitas proses yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsive, dan murah biaya.
3. Akuntabilitas program, akuntabilitas yang terkait dengan pengembangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan

alternative program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.3. Anggaran

Menurut Nafarin (2007:11) Menyatakan ³⁸ bahwa Anggaran adalah suatu rencana kualitatif (satuan jumlah) periodic yang di susun berdasarkan program yang telah disahkan, anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang di nyatakan dalam suatu ruang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Menurut Bahiar Arif, Muchlis dan ³ Iskandar (2002:18) didalam praktik penganggaran di berbagai Negara dan dunia bisnis, model penanggaran telah dikembangkan sesuai kebutuhan, situasi, dan kondisi. Beberapa jenis model anggaran telah di kembangkan seperti berikut :

1. Line Item Budgeting

Model ini merupakan bentuk anggaran yang lama sehingga di kenal dengan tradisional budgeting. Organisasi bisnis maupun sektor publik pada umumnya menggunakan model ini dalam penyusunan anggaran kerna modal ini relative mudah dan sederhana.

2. Incremental Budgeting

Penganggaran dengan modal ini pada dasarnya menggunakan line item budgeting, tetapi dilakukan dengan menambahkan nilai anggarannya dari tahun sebelumnya, serta metode ini sangat konservatif dengan adanya perubahan yang relative kecil atau dengan batas tertentu berdasarkan pertimbangan yang memindai akan tetapi kelemahan nya memungkinkan adanya pendapatan dan pengeluaran yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan.

3. Planning Programming Budgeting Sistem

Model PPBS di kembangkan untuk memungkinkan para pengambil keputusan⁵⁸ berdasarkan perhitungan atau pendekatan ilmiah dari model model manajemen keuangan yang ada, didalam model manajemen keuangan yang ada didalam model ini digunakan cost and benif analysis. Unit penganggaran mencakup wilayah program yang luas ekonomi, kesehatan, pendidikan dengan pelaksana yang berlainan keunggulannya komperatif pelaksan yang berlebihan³ keunggulan nya komperhensif pelaksana program dapat bersaing sedangkan

kelemahannya tidak ada prioritas yang jelas, dan porsi anggaran yang ideal untuk tiap unit satuan sulit diketahui.

4. Pormance Budgetin

Dengan modal anggaran di susun berdasarkan pada kinerja yang dapat diukur dari berbagai kegiatan akan tetapi metode ini juga menggunakan klarifikasi berdasarkan objek seperti line item budgeting. Faktor penentu dalam metode ini adalah efisiensi dari berbagai kegiatan yang ada dengan menetapkan standar biaya dengan standar biaya tersebut di susun anggaran tahun berikutnya dan bias disesuaikan pertimbangannya yang logis serta fokus pada kinerja atau hasil dari program yang di tentukan berdasarkan aspirasi perusahaan.

5. Zero Based Budgeting

Sesuai dengan namanya anggaran disusun dari nol meskipun pada tahun sebelumnya telah dilakukan proses penganggaran, anggaran tidak bergantung pada tahun sebelumnya sehingga hal ini merupakan lawan dari cara incremental budgeting yang sering kali ditemukan adanya program yang sudah tidak efektif tetapi anggaran nya justru meningkat keunggulannya memberi kepastian besar besaran anggaran arah kebijakan lebih jelas sedangkan kelemahannya penutupan prioritas lebih lama dan sering terjadi *mark up*.

2.4. Perencanaan

Perencanaan menurut Erly Suandy¹ adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan.

2.4.1 Karakteristik perencanaan

¹ Dalam perencanaan itu sendiri terdapat berbagai karakteristik yang membedakannya dengan fungsi turunan manajemen lain. beberapa karakteristik dari manajemen itu adalah:

1. Fungsi manajerial

Perencanaan adalah salah satu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga yang paling dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen yakni kepegawaian, pengarahan perorganisasian dan juga pengadilan, karna di dalam nya di lakukan¹ ruang lingkup rencana yang di buat.

2. Berorientasi pada tujuan. perencanaan akan lebih fokus ke dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan mengidentifikasi tindakan alternative serta memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat untuk mencapai tujuan utama perusahaan.

3. Pervasive ¹ Perencanaan yang harus bias turut adil pada seluruh segmen dan turut hadir pada seluruh level dalam organisasi walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dalam tingkat department
4. Proses berkelanjutan rencana di buat dalam kurun waktu tertentu seperti satu bulan, satu kuartal, satu tahun, dll setelah kurun waktu tersebut sudah selesai maka di perlukan rencana baru dengan berbagai pertimbangan dan juga persyaratan serta kondisi saat ini dan di masa depan nanti.
5. ¹ Proses intelektual perencanaan adalah suatu proses dari latihan mental yang didalamnya melibatkan bebrapa logika cera berfikir memperkirakan, serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi.
6. Futuristik dalam suatu proses perencanaan, kita bias mengintip masa depan. Hal ini mencakup memperoyeksikan masa depan melakukan analisa dan juga memprediksinya, sehingga pihak perusahaan akan siap menghadapi masa depan secara lebih efektif.
7. Pengambilan keputusan
Keputusan bias dibuat terkait dengan pilihan yang bias ¹ dipilih harus yang terbaik diantara semua pilihan yang ada, yang didalamnya mempunyai banyak kelebihan dan juga sedikit keuntungan.

2.4.2. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan pada dasarnya berguna untuk membantu berbagai proses pengampilan suatu keputusan yang paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Dalam proses pelaksanaannya, pihak manajer harus mampu menjawab pertanyaan 5W dan 1H yakni sebagai berikut

1. **What** : apa tujuan yang hendak dicapai desa?
2. **why** : kenapa hal tersebut menjadi tujuan desa?
3. **When** : kenapakah pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut
4. **Who** : siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan desa?
5. **How** : bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencaoai tujuan perusahaan.

2.4.3. Tujuan perencanaan

Setiap desa tentunya mempunyai tujuannya masing masing dan pasti berbeda beda. Tapi pada dasarnya, tujuan desa perencanaan adalah sebagai berikut ini :

1. Demi mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi.

2. Demi memberikan arahan kepada para administrator ataupun non administrator agar bias melakukan tugas nya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat.

3. Menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan.

Menentukan suatu standar tertentu nantinya harus bias digunakan dalam berkerja, sehingga akan memudahkan proses pengawasan ataupun pemantauan.

2.5. Jenis-Jenis Perencanaan

Pada umumnya, perencanaan terbagi menjadi tiga, yakni berdasarkan tingkatannya, berdasarkan jangka waktunya, dan juga berdasarkan ruang lingkupnya sebagai berikut:

1. Perencanaan berdasarkan tingkatan
 - a. Master plan atau rencana induk adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pada kebijakan perusahaan yang mana didalamnya tercantum tujuan dalam kurun waktu dan ruang lingkup yang jelas.
 - b. Operational planning atau rencana oprasional, adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pada pedoman ataupun petunjuk dalam hal melaksanakan pada pedoman ataupun petunjuk dalam hal melaksanakan berbagai program perusahaan.

- c. Day to day planning atau rencana harian, adalah perencanaan yang lebih berdifat umum rutin.
 - d. ¹ Perencanaan berdasarkan jangka waktu
 - e. Rencana jangka panjang atau long term planning, adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 10 hingga 25 tahun.
 - f. Rencanan jangka pendek menengah atau medium range planning adalah suatu perencanaan yang di buat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 5 hingga 4 tahun
 - g. Rencana jangka pendek atau short range planning, adalah suatu perencanann yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 1 tahun.
2. Perencanaan Berdasarkan Ruang Lingkup
- a. Rencana strategis atau strategi planning, adalah suatu perencanaan yang didalamnya memiliki penjelasan terkait kebijakan dalam kurun waktu yang lama dan waktu pelaksanaannya pun juga lama. Biasanya , jenis perencanaan ini sangat sulit untuk dimodifikasi.
 - b. Rencana tektis atau tectial planning, adalah sutau bentuk perancanaan yang didalamnya memiliki penjelasan yang lebih bersifat pendek, serta lebih mudah untuk disesuaikan kegiatannya selama tujuannya masih sama.

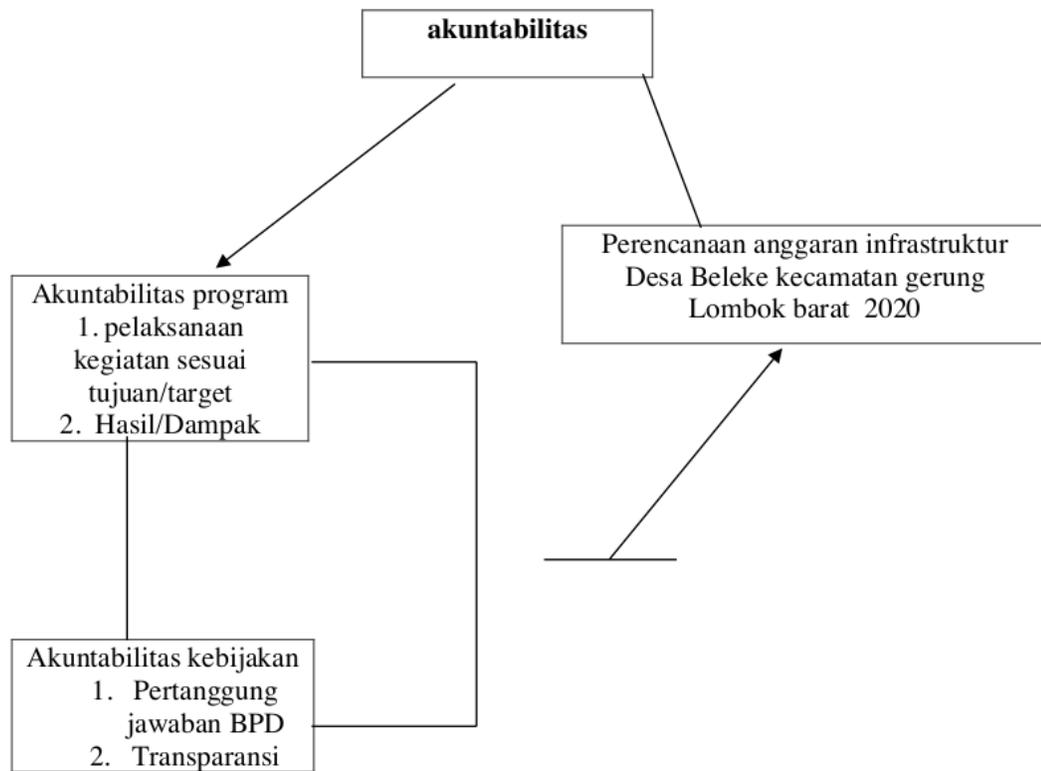
- c. Rencana terintegritas atau intergrated planning, adalah suatu bentuk perencanaan yang didalam nya memiliki penjelasan secara menyeluruh dan lebih terpadu.

2.6 . Kerangka Berfikir

⁸ Untuk memudahkan penulis dalam rangka penyusunan rencana penelitian ini maka dibutuhkan satu landasan berfikir yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjelaskan masalah yang di sorot

Menurut Sugiono (2017:60) memukakan ²³ bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagai mana teori berhibungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar 2.1

Kerangka berfikir penelitian

sumber Raba 2006

2.7. Definisi konseptual

Definisi konseptual adalah salah satu ¹⁴ pemikiran umum yang berusaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman definisi konseptual juga merupakan penggambaran hubungan konsep konsep khusus yang menentukan variable –variable yang saling berhubungan. Maka definisi konseptual.

- ² Akuntabilitas program, akuntabilitas yang terkait dengan pengembangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
- Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.8. Definisi oprasional

Definisi oprasional adlah standar ukur atau indikator penelitian untuk mengaitkan ²⁹ arti pada suatu konstruk atau variable dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur konstrak atau variable itu.

Dengan demikian definisi operasional dapat dirumuskan sebagai ukuran dan indikator dari suatu variabel untuk dijadikan pijakan dalam membahas hipotesis yang dicari kebenarannya.

Gambar 2.2

Definisi operasional

No	Variabel	Indikator
1	Akuntabilitas program	1. Pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan/target
2	Akuntabilitas kebijakan	1. Pertanggung jawaban ke BPD 2. Transparansi

BAB III

8 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

Definisi metode penelitian kualitatif menurut Imam Gunawan.

⁶ Jenis temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya Berusaha memahami dan menafsirkan makna sesuatu peristiwa intraksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Di lakukan dalam situasi yang wajar metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna sesuatu peristiwa intraksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang di teliti secara mendalam bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah.

⁵ 3.2. lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Lombok barat berdasarkan dengan judul yang di angkat oleh peneliti yang berkaitan tentang akuntabilitas perencanaan anggaran dana desa ⁵⁹ di Desa beleke kecamatan gerung Lombok barat 2020, Adapun waktu yang digunakan oleh peneliti yaitu mulai dari Juli 2021 sampai Agustus 2021.

⁸ 3.3. Teknik penetapan narasumber

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *pepossive sampling*. ⁵ *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (sugiono; 2019). Yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah para informan yang mengetahui dan sapat membrikan jawaban atas rumusan masalah yang mengetahui dan dapat membrikan jawaban atas rumusan ⁸ masalah dalam penelitian ini atau data yang dibutuhkan oleh peneliti tentang akuntabilitas perencanaan anggaran dana desa ⁵⁹ di Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok Barat 2020. Informen yang dimaksud atau narasumber yang dimaksud ialah orang dari Desa yang bersangkutan, kepala desa, sekdes juga stap desa lainnya dan masyarakat yang menjadi penerima kebijakan penilai kebijakan pemerintah desa itu sendiri

Tabel 2.3
Narasumber penelitian

No	Narasumber	Jumlah
1	Kepala desa	1
2	Ketua BPD	1
3	Staf desa	4
4	Tokoh masyarakat	4
5	Kepala dusun	4
Jumlah		14

3.4 Sumber Data

Puhantara. (2020:79) Sumber data didalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting karna sumber data akan menyangkut kualitas hasil olh kerennya sumber data menjadi pertimbangan dalam penentuan metode

1. Data primer adalah

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memeproleh data atau informasi langsung menggunakan instrument-instrument yang telah didapatkan

Tabel 2.4
Unit analisa data primer

No	Variable	Indicator	Jenis data	Narasumber
1	Akuntabilitas program	1. Pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan/target 2. Hasil atau dampak	1. Bagaimana Pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan/target 2. Hasil atau dampak	1. Kepala desa 2. Ketua BPD 3. Staf Desa 4. Tokoh masyarakat 5. .Kepala dusun

2	Akuntabilitas kebijakan	1. Pertanggung jawaban BPD 2. transparansi pelaksanaan program infrastruktur	1. Bagaimana Pertanggung jawaban BPD 2. transparansi pelaksanaan program infrastruktur	6 1. Kepala desa 2. Ketua BPD 3. Staf Desa 4. Tokoh masyarakat 5. Kepala dusun
---	-------------------------	---	---	---

2 Data skunder

33
(Moehar, 2002:113) Data skunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sbagai statistik atau data yang sudah diolah semakin rupa sehingga siapapun rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia di kantor-kantor birikrasi pemerintahan, biro jasa data perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data

Tabel 2.5

Unit analisa data skunder

No	Variable	Indicator	Jenis data	Sumber data
1	Akuntabilitas program	1. Pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan/target 2. Hasil atau dampak	1. Dokumen Musrebangdes 2. APBDes 3. Realisasi anggaran	1. Kantor desa 2. Kantor desa 3. Kantor desa
2	Akuntabilitas kebijakan	1. Pertanggung jawaban kepada BPD 2. 2. transparansi pelaksanaan program infrastruktur	1. Dokumen laporan kegiatan pembangunan infrasturktur 2. Papan pengumuman anggaran	1. Kantor desa 2. Kantor desa

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Kortono dalam Taufikurrahman (2017: 38), observasi adalah studi yang diselenggarakan dalam sistematis tentang fenomena sosial dalam gejala-gejala fisik dengan cara pengamatan dan pencitraan, selanjutnya dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.

b. Wawancara

Menurut Afifudin (2012: 131), teknik wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Wawancara dapat dilakukan dengan pedoman wawancara dengan tanya jawab secara langsung. Teknik wawancara digunakan bertujuan untuk mendapatkan data dari informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terstruktur.

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur yang telah dirumuskan peneliti dan yang akan dilakukan kepada informan atau nara sumber yang mengetahui dan dapat memberikan

informasi atas rumusan masalah dalam penelitian ini tentang akuntabilitas perencanaan dana desa. Narasumber atau informan yang akan diwawancarai.

c. **Dokumentasi**

Dalam afifudin (2012: 131), metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data informasi melalui pencarian dan penemuan data yang berasal dari non-manusia.

Sumber data berupa dokumentasi sangatlah dibutuhkan untuk mendapatkan atau melengkapi memperkuat sumber data yang ada.

(Haris, 2012 dengan studi dokumentasi mengumpulkan data dapat dilakukan dengan mencari dokumen atau data yang berkaitan dengan fokus peneliti ,baik data yang didapatkan berupa laporan tertulis ataupun laporan tidak tertulis dan juga data yang dapat dari media yang ada.

3.6 **Teknik Analisis Data**

Menurut sugiyono dan taulikrohman (2017:42), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam priode tertentu pada saat wawancara,peneliti sudah melakukan analisis terhadapjawaban yang di wawancarai, bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penelitian akan melanjutkan pernyataan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel,

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang sudah jenuh (miles dan huberman dalam taufikurahman, 2017:42)

11
a. Reduksi Data

Reduksi data berarti mereangkum, memilih hal hal yang pokok fokus pada hal hal yang penting, dicari tema pada polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari lagi bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan membrikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendiskripsikan data kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel grafik. Phie chatd, pictogram, dan sejeniskan. Melalui penyajian tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan antara katagori, flowchard dan sejenisnya.

c. **Penarikan kesimpulan**

Langkah ⁵ selanjutnya ialah penerikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah ubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan pada tahap awal didukung oleh bukti bukti yang valid dan konstisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

34

4.1.1 Asal-Usul/Legend Desa

Tertulis / terdengar cerita daerah perdesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau, diatas tanah yang datar ditumbuhi pohon dan semak yang masih lebat hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk prinitif, Desa “BELAKAH” orang menyebutnya. 3 Km kearah utara dari Gerung disanalah letaknya.

Konon pada masa penjajahan Belanda diwilayah ini terdapat sebuah tempat berupa kebun yang di dalamnya ada mata iar yang cukup besar dan air nya sangat jernih serta dihiasi dengan pepohonan yang batang nya rata-rata berukuran besar dan daunnya lebat. Dengan keadaan alam yang begitu menyejukan maka tak heran tempat ini dijadikan sebagai tempat istirahat yang hanya untuk sekedar mandi dan melepas lelah dalam melakukan perjalanan. Dari hari kehari tempat ini semakin banyak di singgahi oleh orang dari manca Desa dan membuat keadaan wilayah ini menjadi ramai. Dengan adanya keramaian tersebut banyak yang menjadikannya kesempatan dalam mengais rezeki yakni dengan berjualan makanan dan minuman.

Karna kepopulerannya tempat ini, banyak orang yang berdatangan baik dari kalangan tua maupun dari kalangan muda-mudi. Bukan hanya untuk rekreasi tetapi untuk beberlanja makanan dan minuman. Melihat kondisi yang demikian makan orang tua yang tinggal diwilayah tersebut berinisiatif mendirikan sebuah bangunan besar nan kuat yang terbuat dari kayu. Konon bangunan tersebut menjadi dasar berdirinya nama Desa BELEKE yang berasal dari bahasa sasak yakni *bale kekah* artinya kuat/kokoh. Bale kekah tersebut jika di akronimkan dalam bahasa sasak menjadi BALEKAH. Namun seiring dengan kemajuan zaman dan untuk mempermudah pelafalanya. Akronim BELEKAH berubah menjadi BELEKE.

Kemudian sekitar tahun 1964 dusun tersebut pernah dilanda peristiwa yang sangat dasyat. Yakni peristiwa kebakaran. Dalam kebakaran si jago merah menghancurkan seluruh bangunan rumah didusun tersebut kecuali satu bangunan yang tak tersentuh oleh api yakni bangunan rumah milik AMAQ RAISAH. Dengan peristiwa kebakaran itu, dusun ini juga terkenal dengan nama BELEKE JULAT yang artinya BELEKE TERBAKAR dan satu unit bangunan rumah milik AMAQ RAISAH yang tidak tersentuh oleh si jago merah menandakan arti yang sebenarnya dari (BALEKEKAH).

23

Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat adalah :

Tabel 4.1**Nama Nama Kepala Desa** Beleke Dari Tahun Ke Tahun

No	Priode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	Tidak di ketahui	M. SUKARAH	Gerung
2	Tidak di ketahui	LALU ADUL	Gerung
3	Tidak di ketahui	AMA1 DURAT	Mendagi
4	Tidak di ketahui	AMAQ TINAH	Beleke
5	Tidak di ketahui	LALU KARTALAM	Gerung
6	Tidak di ketahui	H. KARIM	Dasan Tapen
7	1951 – 1956	H. GAZALI	Dasan Tapen
8	1967 – 1984	BOHARI DAHLAN	Dasan tapen
9	1984 – 1986	MAHNAN	Dasan Tapen
10	1986 – 2001	DRS. H MUSLIHAT	Bileteping
11	2002 – 2006	DWI ZAINUL SUNARDI,SPd	Mendagi
12	2007 – 2018	JUNAIDI HM	Bileteping
13	2019-2021	H.MULYADI, SH.	Gerung

Sumber: Arsip Desa beleke

4.1.2. Geografis Desa

Desa beleke terletak paling utara diwilayah gerung yang merupakan pintu gerabng ibu kota Lombok Barat. Adapun batas-batas Desa beleke adalah :

37
sebelah utara : Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri

sebelah timur : Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung

sebelah selatan : Desa Gerung Utara dan Desa Dasan Geres

sebelah barat : Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri.

Tabel 4.2

Adapun geografis Desa Beleke penggunaan lahan lainnya adalah

21 TANAH SAWAH		
Sawah irigasi teknis		Ha
Sawah irigasi ½ teknis		Ha
Sawah tanah kering	152	Ha
TANAH KERING		
Tegal/lading	1	Ha
Pemukim ⁵⁶	5.722	Ha
Tanah fasilitas umum		
Kas Desa	0,12	Ha
Lapangan	0,32	Ha
Perkantoran pemerintah	1,5	Ha
Lainnya ²¹	-	Ha
Jarak ke ibu kota Kecamatan terdekat	2	Km
Lama tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat	10	Menit
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan terdekat	Akuntan perdesaan	
Jarak ke ibukota ke Kabupaten	2	Km
Lama tempuh ke ibukota Kabupaten	10	Menit
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten	Sepeda motor	
IKLIM		
Curah hujan		Mm
Jumlah bulan hujan		Bln
Suhu rata rata harian		Oc
Tinggi tempat		Mdl
Bentang wilayah		Datar

Sumber: Arsip Desa beleke

4.1.3. Demografi desa

Kependudukan

Penduduk Desa Beleke ⁹ sampai dengan bulan mei 2021, berjumlah 6643 jiwa terdiri dari penduduk Laki-Laki 3188 Jiwa dan penduduk perempuan 3455 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1811 KK, yang tersebar di 4 (empat) Dusun dengan perincian penyebaran sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah KK yang ada di Desa Beleke

⁹ No	Dusun	Jumlah KK	Penduduk laki-laki	Penduduk perempuan	Jumlah jiwa
1	Mendagi	457	767	839	1606
2	Beleke	514	1006	1089	2095
3	Biletepong	644	1089	1209	2298
4	Barak bokong	196	326	318	644
Jumlah		1811	3188	3455	6643

Sumber: Arsip Desa beleke

Tabel 4.4

Tingkat Pendidikan Penduduk

URAIAN	JML	¹⁹ SATUAN
Jumlah penduduk buta huruf	1.644	Orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	325	Orang
Jumlah penduduk tamat SD/ Sederajat	1.733	Orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/ Sederajat	425	Orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	284	Orang
Jumlah penduduk tamat D-1	33	Orang
Jumlah penduduk tamat D-2	55	Orang
Jumlah penduduk tamat D-3	25	Orang
Jumlah penduduk tamat S-1	114	Orang
Jumlah penduduk tamat S-2	4	Orang

Sumber: Arsip Desa beleke

Tabel 4.5
40
Wajib Belajar 9 Tahun

Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	1.242	Orang
Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	1.237	Orang
Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	5	Orang

Sumber: Arsip Desa beleke

4.1.4. Keadaan Sosial

1. Suku

Sebagian besar penduduk Desa Beleke terdiri dari Suku sasak akan tetapi terdapat suku lainnya seperti suku jawa, suku Bima, Suku Sumbawa, Suku Sumatra yang merupakan penduduk pendatang yang menetap di wilayah Desa Beleke.

2. Agama

Penduduk Desa Beleke 100% beragama Islam dan mempunyai tempat pibadahan berupa Masjid dan Musholla yang ada di setiap Dusun diantaranya:

1. Masjid "JAMI YAHYA " Dusun Mendagi
2. Masjid "NURUL HUDA " Dusun Beleke
3. Masjid "JAMI' BAITUL MAKMUR " Dusun Beleke
4. Masjid " NURUL HIDAYAH " Dusun Bileteping
5. Masjid " ISTIQOMAH " Dusun Barak Bokong

3. Sarana pendidikan

Tabel 4.6
Pendidikan Formal

No	NAMA LEMBAGA	TEMPAT	KETERANGAN
1	SDN 1 Beleke	Mendagi	
2	SDN 2 Beleke	Beleke	
3	SDN 3 Beleke	Bileteping	
4	MTs. Darun Najah	Beleke	
5	TK Darma Wanita Beleke	Bileteping	
6	TK Paidagogia	Mendagi	

Sumber: Arsip Desa beleke

Tabel 4.7
Pendidikan Non Formal

No	NAMA LEMBAGA	TEMPAT	KETERANGAN
1	Yayasan ARRAHMAN	Mendagi	

Sumber: Arsip Desa beleke

4. Keamanan dan ketertiban

Kondisi keamanan penduduk cukup aman walau demikian ada beberapa kendala yang perlu di benahi yaitu sarana Pos Keamanan/Pos Ronda yang masih memerlukan perhatian kita dan lampu penerangan jalan

Tabel 4.8

Sarana dan Perasarana kesehatan

SARANA PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
puskesmas pembantu	1	Unit
Posyandu	4	Unit
19 mpat dokter praktik	2	Orang
Jumlah Dokter Umum	2	Orang
Jumlah pramedis	5	Orang
Jumlah Dukun terlatih	4	Orang
Pondok bersalin	1	Unit
Bidan Desa	1	Orang
Apotik	1	Unit

Sumber: Arsip Desa beleke

4.1.5. Keadaan Ekonomi

9 Penduduk desa beleke sebagian besar bermata pencarian sebagai petani dan Buruh tani (70%), di samping itu juga asa sebagai pedagang, pertukangan, buruh bangunan, Tenaga kerja Indonesia (TKI), Pengerajin, dll.

Tabel 4.9

Jumlah Pengangguran

32 URAIAN	JUMLAH	SATUAN
Jumlah angkatan kerja (penduduk usai 15-55 tahun)	4.182	Orang
jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang masih sekolah	1.359	32 ang
Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang menjadi IRT	647	Orang
Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang berkerja penuh	750	Oaring
Jumlah 48 iduduk usia 15-55 tahun yang berkerja tidak tentu	1.426	Orang
Jumlah rumah tangga petani	250	Rtg
Jumlah total rumah tangga petani	750	Rtg
Jumlah rumah tangga buruh tani	1.350	Rtg
Jumlah rumah tangga buruh petani	2.500	Rtg

Sumber: Arsip Desa beleke

Tabel 4.9
Kemiskinan

25	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
	Jumlah kepala keluarga	1.609	Keluarga
	Jumlah keluarga prasejahtera	909	keluarga
	Jumlah keluarga sejahtera 1	315	Keluarga
	Jumlah keluarga sejahtera 2	354	Keluarga
	Jumlah keluarga sejahtera 3	29	Keluarga
	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	2	Keluarga
	Rumah berdinding tembok	1.498	Keluarga
	Rumah berdinding bamboo	99	Keluarga
	Rumah lantai keramik	495	Keluarga
	Rumah lantai semen	1.020	Keluarga
	Rumah lantai tanah	22	Keluarga

Sumber: Arsip Desa beleke

Tabel 4.10
Mata pencarian

URAIAN	JUMLAH	SATUAN
Buruh tani	1.350	Orang
Petani	250	Orang
Pedagang/ wirasuasta/ pengusaha	1.920	25 ang Orang
Pengrajinan	211	Orang
PNS	105	Orang
TNI/Polri	5	Orang
Penjahit	23	25 ang Orang
Montir	27	Orang
Karyawan swasta	463	Orang
Kontraktor	4	Orang
Tukang kayu	163	Orang
Tukang Batu	3	Orang
Guru Swasta	65	Orang

Sumber: Arsip Desa beleke

72 4.2.2. Kondisi Pemerintah Desa

9 4.2.1. pembagian wilayah desa

Desa Beleke terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu :

1. Dusun Mendagi Kepala Dusunnya **M. RIDHO**
2. Dusun Beleke Kepala Dusunnya **SAFWAN**
3. Dusun Bileteping Kepala Dusunnya **H. M. SOBRI**
4. Dusun Barak Bokong Kepala Dusunnya **SYAHDIN**

Sedangkan untuk pelaksanaan teknis lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pekasih subak Mendagi 1 adalah **ABDURAHMAN**
2. Pekasih subak Mendagi 2 adalah **H.MUHAMAD ZAINIY**
3. Pekasih subak Beleke adalah **HAMKA**
4. Pekasih subak Bileteping adalah **H. MUJIBURAHMAN (PJS)**
5. Penghulu Desa Beleke **MUSTIAH (PJS)**

71 4.2.2. Struktur organisasi Pemerintah Desa

1. Perangkat Desa :

Struktur pemerintah desa Beleke mengacu pada 50 peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 6 Tahun 2007, tentang pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan struktur sebagai berikut :

Kepala Desa : H. MULLUADI, SH.
Sekertaris Desa : AMRULLAH YUSUF
Unsur Staf :
Seksi pemerintahan : SUDIRMAN
Seksi pelayanan : SAJIDI
Urusan keuangan : MAHFUZ
Seksi kesejatraan : ZAINUDIN PRATAMA
Seksi Adm/Umum : MARDIAH
Urusan perencanaan : FATHUL JANNATUL AULIA

2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Susunan kepengurusan ⁴¹ Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Beleke adalah sebagai berikut :

Ketua : ISLAHUDIN, S.IP

Wakil ketua : ASWAN

Sekertaris : H. SUHAILI, SH.

Anggota Anggota :

1. RUSNAN
2. JAYADI
3. SAPARUDIN
4. ABDUL KHALIQ

5. SAHMAD, SE
6. MUHAMAD H. MUSLEH
7. L. ISMAIL
8. TOHRI

3. Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Adapun susunan/ srstruktur LPM Desa Beleke sesuai dengan SK

Kepala Desa Beleke

1. RAMLI : KETUA UMUM
2. HARIADI : ketua 1
3. MAHLI : ketua II
4. H.M KHAIRI : Sekertaris
5. SAJIADI : Bendahara
6. YUDI ARDIANSYAH :Sie Pembangunan
7. KAMRAN : Sie Ekonomi
8. NIA OVALINA : Sie Kesehatan
9. REHAN SH : Sie Perlindungan HAM
10. SAEPUDIN :Sie Keamanan dan Ketrtiban
11. H. BAHARUDIN :Sie Ekonomi
12. ISMAN :Sie Pendidikan dan Olah Raga
13. HARDI :Sie Teknologi Tepat Guna

14. BAHARUDIN : Sie Kebudayaan dan Parawisata

15. LULU PRIDA : Sie Kesejahteraan Sosial dan PP

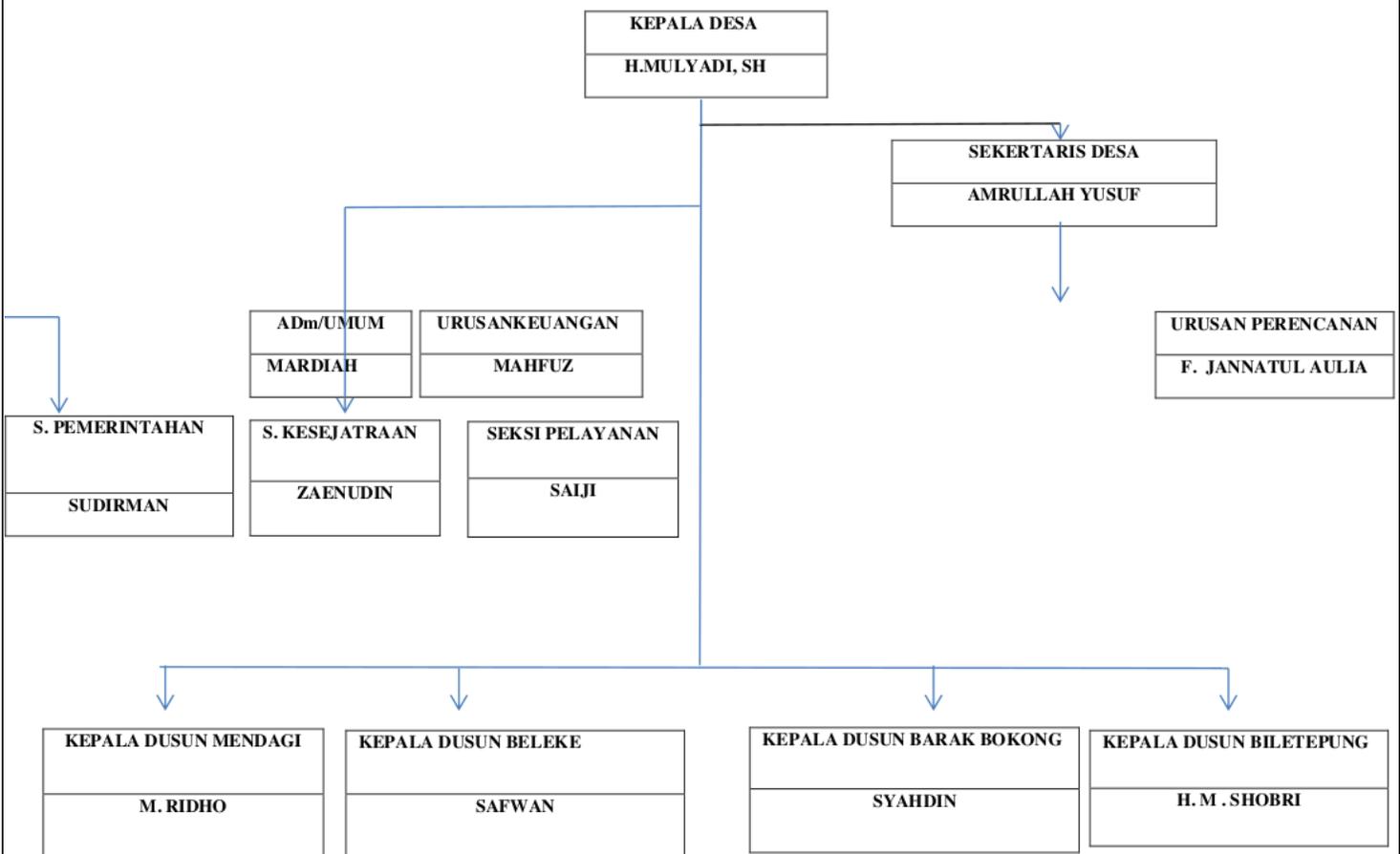
4.2.3. Struktur organisasi

Desa Beleke menurut sistem kelambagaan pemerintah Desa dengan pola minimal sebagai berikut :

Tabel 4.11

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten

Lombok Barat



Sumber: Arsip Desa beleke

4.2 Akuntabilitas Perencanaan Anggaran Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok Barat 2020

A. Akuntabilitas Program

⁴² Akuntabilitas kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat desa. Ini artinya perlu adanya transparansi kebijakan terkait dengan perencanaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur desa. ² Sehingga masyarakat desa dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

1. Target Pelaksanaan Kegiatan

Salah satu indikator dari akuntabilitas program adalah sejauh mana pelaksanaan kegiatan penganggaran di Desa dapat melampaui target sesuai dengan rencana kegiatan. Untuk menjelaskan hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala Desa Beleke. Musyawarah ialah jalan terbaik untuk membuat kegiatan perencanaan agar menjadi sukses dan berkualitas.

Berdasarkan wawancara dengan H. Mulyadi S.H, Kepala Desa Beleke, bahwa :

Untuk meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban terkait dengan target perencanaan kegiatan anggaran dana desa untuk

pembangunan tentu tidak bisa diselesaikan oleh pihak desa saja perlu ada nya pemikiran pemikiran dari semua pihak yang terlibat seperti minsalnya masyarakat mendukung kegiatan dan bersinergi dalam pembangunan desa khususnya infrastruktur yang a73 di Desa Beleke dengan begini tidak ada lagi pembangunan yang tidak bertanggung jawab seperti yang kita ketahui tahun tahun yang lalu masih ada kekurangan kekurangan yang masih saja menjadi kendala menciptakan pembangunan yang berkua67s.(wawancara pada tanggal 12 juli 2021 di Kantor Desa Beleke Pukul 10.00 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menegaskan bahwa pihak Desa tidak dapat berkerja sendiri tentu adanya bantuan 26 dari masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan baik dari musyawarah dan pengawasan dilapangan untuk melihat pertanggung jawaban pihak desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Beleke.

Di bawah ini peneliti mengetengahkan data tentang pelibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran desa yang menjadi rolak ukur ketercapaian target kegiatan perencanaan.

Tabel 4.12
Kehadiran Masyarakat Desa dalam Perencanaan Anggaran Desa Beleke

No	Nama	Kapasitas	Dusun
1.	H. Mulyadi S.H	Kepala Desa	Gerung utara
2.	Amrurillah yusuf	Sekertaris Desa	Barakbokong
3.	M.Ridho	Kepala Dusun	Mendagi
4.	Sapwan	Kepala Dusun	Beleke
5.	Syahdin	Kepala Dusun	Barakbokong
6.	H.M Sobri	Kepala Dusun	Biletampung
7.	Manah	Ketua RT 01	Mendagi
8.	Uyat	Ketua RT 02	Mendagi
9.	Fauzan	Ketua RT 03	Mendagi
10.	Hamdi	Ketua RT 04	Mendagi
11.	Mustiah	Ketua RT 05	Mendagi

12.	Herpan	Ketua RT 06	Mendagi
13.	Sukri	Ketua RT 07	Mendagi
14.	Darwan	Ketua RT 08	Mendagi

Sumber : data diolah peneliti 2021

Hal serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat bapak Fauzan pada wawancara beliau mengatakan bahwa

Kami selaku warga dan masyarakat sangatlah senang ada nya program unggulan berupa bentuk fisik yaitu pembangunan di setiap dusun yang ada di Desa Beleke ini namun perlu juga pengawalan dari pihak pihak yang terlibat jangan sampai hal yang tidak kita inginkan kembali terjadi oleh karna itu perlu pengawasan yang intens kami sebagai masyarakat sangat mendukung ada nya program pembangunan apalagi bersifat panjang dampak nya bagi kita semua. Namun kita ketahui bersama kendala pasti ada terlebih adanya bencana global yakni covid 19 yang menyerang dunia saat ini. Semua nya mari kita rembuk kan masalah masalah yang ada melalui musyawarah Dusun maupun Desa. (**wawancara**

Pada 13 juli 2021 Di kantor Desa jam 11.00 WITA)

64

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembangunan ialah proses yang tidak mudah pasti ada masalah kecil amupun besar namun semua itu akan diselsaikan dengan cara dimusyawahkan dan direncanakan dengan semua pihak yang ada di Desa Beleke untuk menemukan hasil yang maksimal guna menghujutkan Desa yang aman maju dan sejatra oleh karna itu pihak Desa tidak bias berkerja sendiri pasti butuh bantuan perwakilan masyarakat dan pihak yang terlibat.

4.3 Trasfaransi Perencanaan Anggaran Pemerintah Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok Barat 2020

²⁵ Aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini yang mendorong pihak desa untuk terus memperhatikan program program yang dilaksanakan kerna akan tetap di awasi oleh masyarakat itu sendiri kerna masyarakat juga punya hak penuh di dalam nya. Oleh karna itu musyawarah melahirkan rencana apa saja yang akan di butuhkan pada saat melaksanakan program dan berapa dana yang di butuhkan. Dengan begitu terlihat jelas arah pembangunan ke arah yang sesuai atau yang tidak sesuai.

Ditingkat desa sendiri khususnya Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok Barat .

⁶⁸ Dari tabel diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa anggaran yang dikeluarkan sangatlah banyak untuk melaksanakan program program yang sudah disepakati bersama dan cenderung defisit lumayan banyak hal ini menyimpulkan bahwa anggaran yang di keluarkan sangatlah banyak untuk melaksanakan pembangunan desa itu dan penanganan ⁷⁴ Covid 19 yang saat ini belum juga berakhir

Masyarakat mendukung dan antusias dalam menyambut pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Beleke kecamatan gerung ini dan melimpah nya anggaran yang ada sehingga pelaksanaan nya harus memenuhi sasaran selain itu pihak desa berkerja sama dengan BPD untuk menyelesaikan proyek pembangunan yang ada dan sudah di sepakati oleh banyak pihak anggaran yang sudah ada dan

sangat banyak mempermudah jalan nya pembangunan infrastuktur yang ada di Desa Beleke kecamatan Gerung Lombok barat.

B. Akuntabilitas Kebijakan

³⁹ Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah Desa terhadap BPD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

1. Pertanggungjawaban BPD

Salah satu indikator dari akuntabilitas kebijakan pertanggungjawaban BPD pengawasan kegiatan untuk ² masyarakat luas artinya perlu transparansi kebijakan agar masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan dalam pengambilan keputusan. Untuk menjelaskan hal tersebut peneliti mewawancarai kepala BPD Desa Beleke.

Berdasarkan wawancara dengan Usni kepala BPD Desa Beleke

Bahwa :

Kami selaku aparat desa tentu ingin yang terbaik untuk masyarakat Desa yakni dengan membritaukan kegiatan kegiatan yang akan di selenggarakan dan kami terus pantau sampai terlaksana semua program yang sudah kita semua sepakati di rapat

MUSREMBANGDES dan kami akan pantau terus selama proses kegiatan berlangsung. Namun seperti yang kita ketahui bersama tahun 2020 terjadi bencana yakni covid 19 yang mengakibatkan dana program pembangunan terealisasi hanya beberapa yakni rabat jalan pembuatan saluran irigasi penambahan lampu penerang jalan dan rehap rumah dusun karna anggaran teralihkan ke anggaran tidak terduga. Seperti itu ucap pak Husni dan kami tetap kawal dan memperhatikan peraturan peraturan yang ada. **(Wawancara pada 14 juli 2021 di kantor Desa JAM 11.WITA).**

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengawasan yang harus tetap ditingkatkan lagi pada saat kegiatan yang berlangsung terutama pengawasan untuk anggaran yang disalurkan ke mana saja dan apa bentuk bukti nyata bahwa sudah sesuai atau tidak pelaksanaan yang sudah dikerjakan. Berikut tabel rencana pembangunan Desa Beleke kecamatan Gerung Lombok Barat.

Tabel 4.13
Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok Barat Tahun 2020

No	Jenis pembangunan	Jumlah Anggaran	Lokasi	Sumber dana
1	Renovasi aula takziah	Rp 2.500.000	Dusun mendagi	ADD
2	Rabat jalan Dusun	Rp 5.000.000	Dusun mendagi	DD
3	Lampu penerang	Rp 2.000.000	Dusun mendagi	DD
4	Tembok kuburan	Rp 7.500.000	Dusun mendagi	DD
5	TALUD	Rp 30.000.000	Dusun beleke	ADD
6	Jalan beton	Rp 10.000.000	Dusun beleke	DD
7	Pelatihan tata boga	Rp 1.000.000	Dusun beleke	ADD
8	Pembinaan kepemudaan	Rp 1.000.000	Dusun beleke	ADD
9	Menjahit 2 KLMP	Rp 800.0000	Dusun beleke	ADD
10	Rehab paping blok	Rp 1.500.000	Dusun biletampung	DD
11	TALUD	Rp 30.000.000	Dusun biletampung	ADD
12	Pelatihan menjahit	Rp 2.000.000	Dusun biletampung	ADD

13	Pembinaan UMKM	Rp 3.000.000	Dusun biletampung	ADD
15	Pengadaan bak sampah	Rp 1.500.000	Dusun barakbokong	ADD
16	Paping blok gang	Rp 3.000.000	Dusun barakbokong	ADD
17	TALUD	Rp 30.000.000	Dusun barakbokong	ADD
18	Pembinaan kepemudaan	Rp 1.000.000	Dusun barakbokong	DD
Jumlah		69 Rp 126.900.000		

Sumber: Arsip Desa beleke 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pembangunan fisik maupun SDM masyarakat sangat tinggi sehingga perlu pengawasan yang baik dan transparansi anggaran agar dapat dipercaya oleh masyarakat itu sendiri untuk itu perlu nya ada nya keterangan dana maupun peraturan yang di butuhkan dalam melaksanakan program tersebut yang sudah di sepakati bersama di musyawarah.

2. Transparansi

Transparansi yang dilakukan oleh pihak desa sudah menunjukkan ke transparansinya dengan ada nya papan pelang anggaran yang ada di Desa Beleke untuk dilihat oleh masyarakat luas guna menunjukkan anggaran yang di pakai pada saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan wawancara dengan Sekertaris Desa Amrullah Yusup, menegaskan bahwa :

Untuk menciptakan pembangunan yang berkualitas kami selaku pemerintah desa Beleke mengharapkan kerja sama dari semua pihak karna kami tidak bias berkerja sendiri oleh karna itu bantuan pemikiran dan tenaga sangat di butuhkan oleh pihak penyelenggara kegiatan ini semua semata mata untuk kita semualah yang akan merasakan dampak baik maupun buruk nya program pembangunan ini bila sudah terlaksana nanti nya.oleh karna itu kekompakan

juga memengaruhi rencana maupun pikiran kita semua. **(wawancara pada 14-juli-2021 Di kantor Desa Beleke 10.00 WITA)**

5 Selain melakukan wawancara dengan sekretaris desa kemarin peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Dusun Mendagi Desa Beleke Kecamatan

Gerung Lombok Barat bapak Ridho Pratama, menyatakan bahwa :

23 Untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan yang ada di Desa Beleke kecamatan Gerung Lombok Barat perlu adanya kerja sama dengan semua pihak. Sepengatahuan saya sampai saat ini pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di Dusun Mendagi ini belum merata karna masih adanya jalan yang berlubang dan masih ada tempat yang butuh penerangan jalan dan lain lainnya. Ini disebabkan juga factor global yang kita ketahui melanda dunia yakni Covid 19 yang masih melanda sehigga tidak dapat terlaksana secara maksimal pembangunan yang ada di Dusun Mendagi Ini. Pengawasan BPD masih cukup siaga untuk mengawal pembangunan yang ada di Dusun mendagi ini dampak dan hasil dari pembangunan infrastruktur ini bagi masyarakat sangat besar karna besentuhan langsung dengan masyarakat itu sendiri.**(Wawancara pada 15-juli-2021 di kantor Desa Beleke 10.00 WITA)**

10 Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan hasil dan dampak pembangunan infrastruktur ini sangat besar meski tidak merata kerna adanya kendala biaya akibat Covid 19 yang anggaran pembangunan di gunakan untuk menanggapi virus **75** Covid 19 yang melanda pada awal tahun 2020 yang lita semua tau anggaran hampir semua nya di alihkan ke penanganan virus ini.

Selain peneliti mewawancarai Kepala Dusun Mendagi tadi peneliti juga memwawancarai Kepala Dusun Beleke Bapak Sapwan yang mengatakan

kegiatan pembangunan infrastruktur di Dusun Beleke berjalan dengan baik pengawasan yang di lakukan BPD sudah terlaksana papan anggaran ada hasil dan dampaknya sangat banyak bagi masyarakat karna bersentuhan langsung dengan masyarakat itu sendiri meski tidak semua terlaksana karna anggaran desa juga di gunakan untuk keperluan penanganan Covid 19 masih sangat ganas pada tahun 2020 yang lalu sehingga saya dan para RT memaklumi kondisi yang tidak biasa kita salahkan terjadi ini. (**wawancara pada 15-juli-2021 Di kantor Desa Beleke jam 11.00 WITA**)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa kondisi pada tahun 2020 kemarin puncaknya virus Covid 19 yang mengakibatkan pembangunan infrastruktur kurang berjalan dengan sempurna karna anggaran juga terpakai ke penanganan Covid ini kita semua tidak bias menyalahkan kondisi seperti ini karna Negara juga mengalami hal yang sama fokus ke penanganan penyakit ini yang terus meningkat.

Wawancara selanjutnya Bapak Kepala dusun Bileteping Bapak H.Shobri yang mengatakan bahwa

pembangunan yang terlaksana di Dusun Bileteping ini sangat di sambut baik oleh warga sekitar karna mereka sudah lama menantikan nya. Pihak pengawas seperti BPD juga turut hadir dalam pengawasan pada saat terlaksana pembangunan ini ujar bapak Kepala Dusun Bileteping namun ada juga yang belum kena target program yang di usulkan karna kendala anggaran yang kurang mungkin sehingga belum terlaksana dengan baik. Kegiatan pembangunan yang ada di Dusun Bileteping memiliki transparansi anggaran yang jelas sehingga kita semua dapat mengetahui anggaran yang di habiskan untuk pembuatan pembangunan ini (**Wawancara pada 16-juli-2021 di rumah bapak H. Sobri jam 19.00**).

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan pihak pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur ini sudah berkerja dengan baik. Namun pertanggungjawaban jangan sampai pada saat hari eksekusi perlu adanya

pengontrolan lebih lanjut dan ekstra guna mendapatkan hak hak yang di miliki oleh masyarakat itu sendiri oleh karna itu perlu juga anggaran yang jelas dan transparan guna menyakinkan masyarakat akan tentang akuntabilitas perencanaan anggaran yang ada di Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok Bara

Tabel 4.14

27 Realisasi APBDesa 2020 Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok Barat

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH /KURANG
PENDAPATAN			
Alokasi Dana Desa	Rp 674,281,800	Rp 674,281,800	Rp -
Dana Desa	Rp 1,540,977,00	Rp 1,5977,000	Rp -
Bagi hasil pajak dan retribusi	Rp 78,000,000	Rp 80,81,14,40	Rp 2,814,469
Kerja sama pihak ke tiga	Rp 12,334,000	Rp 12,31,14,144	Rp 20,000
Bunga bank	Rp 5,000,000	Rp 4,823,144	Rp 176,856
Total pendapatan	Rp 2,310,592,800	Rp 2,313,210,113	-Rp 2,617,613
BELANJA			
Bidang peyelenggaraan pemerintah desa			
Sub bidang siltab tunai dan orasional pemerintah desa	Rp 561,040,720	Rp 555,212,483	Rp 5828,237
Sub bidang sarana dan prasarana pemerintah desa	Rp 44,692,400	Rp 42,393,850	Rp 2,299,000
Sub bidang administrasi kependudukan	Rp 4,692,400	Rp 4,224,400	Rp -
Sub bidang pencatatan sipil			
Sub bidang tata praja pemerintahan perencanaan keuangan dan pelaporan	Rp 36,217,500	Rp 26,290,000	Rp 9,927,500
Sub bidang pertanahan	Rp 4,550,000	Rp 1,000,000	Rp 3,550,000
27 JMLAH	Rp 650,726,470	Rp 629,120,733	Rp 21,601,737
Bidang pembangunan desa			
Sub bidang kesehatan	Rp 179,904,453	Rp 176,134,063	Rp 3,770,460
Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp 479,925,340	Rp 466,696,940	Rp 13,228,400
Sub bidang kawasan pemukiman	Rp 32,950,300	Rp 32,170,300	Rp 780,000
Sub bidang informasi dan informatika	Rp 3,500,000	Rp 190,000	Rp 1,310,000
JUMLAH	Rp 696,280,163	Rp 677,191,303	Rp 19,088,860
Bidang Pembinaan kemasyarakatan desa			

Sub bidang ketentraman, ketertiban umum 27	Rp 40,600,000	Rp 48,600,000	Rp -
Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	Rp -
Sub bidang kepemudaan dan olah raga 49	Rp 19,325,855	Rp 13,850,000	Rp 5,475,855
Sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp 59,725,000	Rp 59,725,000	Rp -
JUMLAH	Rp 130,150,855	Rp 124,675,000	Rp 19,088,737
Bidang Penanggulangan Bencana			
Sub bidang penanggulangan bencana	Rp 48,010,748	Rp 42,994,500	Rp 5,016,248
Sub bidang keadaan mendesak	Rp 872,100,000	Rp 872,100,000	Rp -
JUMLAH	Rp 920,100,748	Rp 915,094,500	Rp 5,018,248
TOTAL BELANJA	Rp 2,397,267,236	Rp 2,346,081,536	
SURPLUS / DEFISIT	Rp 86,674,436	-Rp 32,871,123	
PEMBIAYAAN			
Penerimaan pembiayaan	Rp 86,674,486	Rp 86,674,487	
SULFA TAHUN BERJALAN	Rp 51	Rp 58,803,364	

Sumber: Arsip Desa beleke 2020

masyarakat juga dapat melihat anggaran yang dikeluarkan melalui APBDes yang ada di pelang anggaran yang ada di Desa Beleke sudah tertera rekapitulasi pada tahun 2020 hal ini menunjukkan keterbukaan informasi Desa Kemasyarakat nya sendiri inilah juga salah satu faktor pendukung agar masyarakat yang ada diDesa Beleke ini percaya kepada pihak desa untuk melaksanakan pembangunan ifrasturktur yang sudah direncanakan jauh jauh hari umtuk menyukseskan program program yang sudah ada.

Lemah nya pertanggungjawaban dari pihak Desa dan pihak BPD Kurang nya perhatian dari pihak Desa dan BPD pada saat program sudah di laksanakan dan

pembangunan infrastruktur sudah berjalan masih terjadi saling menyalahkan bahwa sebenarnya kedua belah pihak harus tetap mengontrol apa saja kekurangan yang terjadi di lapangan dan sampai sejauh mana infrastruktur itu bertahan sesuai jangka waktu yang ditentukan pada saat musyawrah itu sendiri guna menyakinkan masyarakat bahwa pertanggung jawaban dari pihak Desa dan BPD itu ada dan nyata dilakukan oleh kedua belah pihak .

Kita tau bersama adanya wabah Covid 19 ini yang menyebabkan perekonomian yang ada di Negara kita anjlok karna pembatasan kegiatan hal ini juga berdampak pada Desa Desa yang ada kerna butuh juga penanganan Dari pihak desa yang berdentuhan langsung dengan masyarakat itu sendiri dan mau titak mau akan pemangkasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Beleke inilah hambatan yang besar meski dana yang banyak namun juga digunakan kepada keperluan mendesak untuk menanggapi wabah Covid 19 itu sendiri.

Seperti wawancara penulis ke Kepala Dusun BarakBokong Bapak Misrah, menyatakan bahwa:

Beliau menjelaskan bahwa pembangunan yang ada di Dusun Barakbokong ini sudah lama di rencanakan namun saat ini baru terlaksanakan dan tidak sesuai dengan apa yang di sepakati bersama karna kurangnya anggaran yang tersedia untuk pembuatan saluran irigasi besar itu sendiri dan masyarakatlah yang membantu anggaran dengan suadaya untuk menutupi kekurangan anggaran membuat irigasi besar itu ucap bapak kepala Dusun Barakbokong **(wawancara pada 17 Juli 2021 di rumah bapak misrah 14.00 WITA)**

5 BAB V

PENUTUP

5.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Berdasarkan variabel Akuntabilitas program menjelaskan bahwa akuntabilitas perencanaan anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur adalah ⁴² Akuntabilitas kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat desa. Ini artinya perlu adanya transparansi kebijakan terkait dengan perencanaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur desa. ⁵⁵ Sehingga masyarakat desa dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.
- 2) Berdasarkan variabel Akuntabilitas kebijakan menjelaskan bahwa akuntabilitas perencanaan anggarannya dana desa untuk pembangunan infrastruktur adalah ² Akuntabilitas kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah Desa terhadap BPD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam

pengambilan keputusan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Beleke.

- 3) Faktor pendukung dan Faktor penghambat tentu tidak bisa di pisahkan dalam setiap program pembangunan infrastruktur perlu adanya bantuan dari pemerintah Desa dan masyarakat supaya dalam proses pelaksanaan berjalan dengan maksimal sehingga program yang sudah ada terlaksana dengan baik dan lancar mempermudah akses jalan bagi masyarakat sehingga dapat menciptakan Desa Beleke yang lebih maju lagi dalam bidang infrastruktur.

5.2 Saran

1. Bagi pemerintahan Desa

Hendaknya melakukan sosialisasi tentang pembangunan infrastruktur agar masyarakat juga ikut mengawal pembangunan sehingga tidak ada nya kesalah pahaman yang terjadi dan untuk pihak pemerintah Desa dan BPD juga **79 harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah di** laksanakan sesuai waktu yang sudah di tentuan bersama.

2 . Bagi masyarakat

- a. Memahami mekanisme dan melakukan pengawasan yang efektif agar berlangsung nya kegiatan pembangunan dapat kita ketahui dan bila

ada kesalahan dapat di perbaiki bersama dengan musyawarah dengan aturan aturan yang berlaku.

- b. Masyarakat harus menyupot kegiatan yang di sepakati bersama agar kegiatan yang ada bisa terlaksana dan membrikan rung kepada ⁷⁸ pemerintah Desa untuk melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang ada pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- ⁶⁰ AA.GN Ari dwipayana et al., *Membangun Good Governance di desa*, IRE press, Yogyakarta 2003 ;
- Noordiawan, deddi. (2007:284). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- ²⁴ Siti Ainul Widia, Djoko Supatmoko, taufik kurrohman 2017, *Akuntabilitas Pengeelolaan Alokasui dana desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojambi Kabupaten Banyuwangi*, E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi 4 (2), 148-152.
- Deti Kumalasari, Ikshan Budi Riharjo, 2016, *trasparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa*, jurnal ilmu dan riset akuntansi (JIRA) 5 (11)
- ³⁷ Puteri Ainunrohmah Romantis, 2014 , *akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa kecamatan penerukan kabupaten sitobondo tahun 2014* (Management accountability of alokasi dana Desa At Penerukan
- ⁵² Agus subroto, 2009, *akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Temangomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008* Universitas Diponegoro.
- ¹⁶ Nur Anisa Lina Nasehatun Nafidah, 2017/10, *akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Jombang*, Vol 10, No 2, penerbit Departement of Accounting, ⁶³ faculty of economic and Business, syarif Hidayatullah State Islamic University

- Marsyudi. 2013. Akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Halim, Abdul.2012. akuntabilitas sector publik akuntansi keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- LAN & BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Mahmudi . 2013. Manajemen kinerja sector publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Raba, Manggaukang.2006. akuntabilitas konsep dan implementasi. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press.

AKUNTABILITAS PERENCANAAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BELEKE KECAMATAN GERUNG LOMBOK BARAT 2020

ORIGINALITY REPORT

44%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	accurate.id Internet	607 words — 6%
2	www.kajianpustaka.com Internet	604 words — 6%
3	ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com Internet	265 words — 2%
4	www.coursehero.com Internet	201 words — 2%
5	repository.uinsu.ac.id Internet	144 words — 1%
6	docplayer.info Internet	143 words — 1%
7	fr.scribd.com Internet	133 words — 1%
8	repository.ummat.ac.id Internet	133 words — 1%
9	theses.uinmataram.ac.id Internet	127 words — 1%

10	docobook.com Internet	116 words — 1%
11	core.ac.uk Internet	113 words — 1%
12	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	110 words — 1%
13	intancomaladewi34.blogspot.com Internet	102 words — 1%
14	Repository.umy.ac.id Internet	84 words — 1%
15	www.scribd.com Internet	84 words — 1%
16	eprints.walisongo.ac.id Internet	77 words — 1%
17	digilib.uinsby.ac.id Internet	76 words — 1%
18	pelampiasan-cinta.blogspot.com Internet	70 words — 1%
19	desaciwidey.wordpress.com Internet	67 words — 1%
20	mahasiswaindonesia.id Internet	62 words — 1%
21	kejobongkec.blogspot.com Internet	61 words — 1%

22	lib.unnes.ac.id Internet	61 words — 1%
23	repository.radenintan.ac.id Internet	61 words — 1%
24	ejournal.umm.ac.id Internet	59 words — 1%
25	es.scribd.com Internet	59 words — 1%
26	repository.uin-suska.ac.id Internet	57 words — 1%
27	format-administrasi-desa.blogspot.com Internet	56 words — 1%
28	repository.fisip-untirta.ac.id Internet	55 words — 1%
29	repository.uma.ac.id Internet	54 words — < 1%
30	repository.unpas.ac.id Internet	53 words — < 1%
31	www.bappenas.go.id Internet	51 words — < 1%
32	pemdessutawangi.wordpress.com Internet	46 words — < 1%
33	repository.stie-mce.ac.id Internet	42 words — < 1%

id.scribd.com

34	Internet	41 words — < 1%
35	Sayni Armedi, Harijanto Sabijono, Heince R. N. Wokas. "EFISIENSI TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA LIKUPANG DUA, KECAMATAN LIKUPANG TIMUR, KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROVINSI SULUT", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2018 Crossref	38 words — < 1%
36	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	38 words — < 1%
37	123dok.com Internet	33 words — < 1%
38	repository.uinjkt.ac.id Internet	33 words — < 1%
39	repository.usu.ac.id Internet	33 words — < 1%
40	ms.wikipedia.org Internet	32 words — < 1%
41	repository.unhas.ac.id Internet	28 words — < 1%
42	Taslim Fait, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2021 Crossref	26 words — < 1%
43	repository.unmuha.ac.id Internet	25 words — < 1%

44	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	23 words — < 1%
45	floresmuda.com Internet	23 words — < 1%
46	library.uwp.ac.id Internet	23 words — < 1%
47	repository.stei.ac.id Internet	22 words — < 1%
48	ciptim.files.wordpress.com Internet	18 words — < 1%
49	berbek.nganjukkab.go.id Internet	17 words — < 1%
50	mustikajikebumen.blogspot.com Internet	17 words — < 1%
51	digilib.uinsgd.ac.id Internet	15 words — < 1%
52	eprints.mercubuana-yogya.ac.id Internet	15 words — < 1%
53	repository.upi.edu Internet	15 words — < 1%
54	pt.scribd.com Internet	14 words — < 1%
55	id.berita.yahoo.com Internet	13 words — < 1%

rizkanaya.blogspot.com

56	Internet	13 words — < 1%
57	ejournal.stiesia.ac.id Internet	12 words — < 1%
58	eprint.stieww.ac.id Internet	12 words — < 1%
59	eprints.unram.ac.id Internet	12 words — < 1%
60	jurnal.untad.ac.id Internet	12 words — < 1%
61	media.neliti.com Internet	12 words — < 1%
62	m7apriandi.blogspot.com Internet	11 words — < 1%
63	journal.uinjkt.ac.id Internet	10 words — < 1%
64	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	10 words — < 1%
65	repository.uir.ac.id Internet	10 words — < 1%
66	repository.unair.ac.id Internet	10 words — < 1%
67	text-id.123dok.com Internet	10 words — < 1%
68	adoc.tips	

Internet

9 words — < 1%

69 ecampus.iainbatusangkar.ac.id
Internet

9 words — < 1%

70 adoc.pub
Internet

8 words — < 1%

71 atharlalu.wordpress.com
Internet

8 words — < 1%

72 id.123dok.com
Internet

8 words — < 1%

73 jasakonsultanskripsi.com
Internet

8 words — < 1%

74 kostrad.mil.id
Internet

8 words — < 1%

75 pariwisata.gorontaloprov.go.id
Internet

8 words — < 1%

76 radarjember.jawapos.com
Internet

8 words — < 1%

77 repositori.umsu.ac.id
Internet

8 words — < 1%

78 repository.ub.ac.id
Internet

8 words — < 1%

79 sholikhahismyname.wordpress.com
Internet

8 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF